

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian global dalam perkembangannya telah menuntut adanya perdagangan yang lebih terbuka untuk setiap negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang telah mengambil langkah tersebut untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan negaranya. Dampak kerugian besar yang terjadi ketika peperangan yang telah terjadi pada dahulu kala membuat negara-negara di dunia saat ini lebih memilih untuk melakukan kerjasama dari pada perang untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya dan menciptakan kerjasama perekonomian yang dinamis dalam berbagai macam model kerjasama dengan tidak adanya campur tangan dalam hal sistem politik maupun intervensi lain yang menjadi idea bernegara maupun konflik yang terjadi pada internal negara tersebut.

China telah menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar di dunia, dimana kekuatan perekonomian China ini telah menyaingi kekuatan dunia saat ini seperti Jepang dan Amerika Serikat. Pertumbuhan China yang begitu pesat dalam ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan dalam bidang Industri dan Teknologi yang telah dihasilkan (<http://www.worldbank.org/en/country/china/overview> di akses pada 25 Oktober 2018).

Saat ini dengan populasi penduduk sekitar 1,4 miliar. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun sejak China melakukan reformasi ekonomi pada Desember 1978 yang dicetuskan oleh Deng Xiaoping, China berhasil membuka mata dunia untuk menjadi salah satu negara yang patut diperhitungkan dalam perekonomian global (<https://www.worldbank.org/en/country/china/overview>).

Dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping, untuk pertamakali China membuka diri dengan negara liberal, dimana sebelum tahun 1979 China dibawah kepemimpinan Presiden Mao Zedong memiliki sistem pemerintahan yang sangat tertutup. Pada pemerintahan kepemimpinan Deng Xiaoping, walau penerapan sistem ekonomi tertutup hanya saja China mulai membuka diri dengan sistem ekonomi terbuka atau liberal (Shenkar, 2005:56).

Keterbukaan ekonomi China dengan sistem ekonomi terbuka atau liberal yang dipelopori oleh Deng Xiaoping ternyata mampu meningkatkan perekonomian China secara pesat. Kemajuan China secara pesat ini memicu meningkatnya kebutuhan energi terutama untuk Industri-industri di China. Pada dahulu China hanya mengandalkan sumber daya batu bara, seiring berjalannya waktu penggunaan batu bara dalam jumlah besar untuk industri mendapat banyak kritik dari negara-negara lain dan PBB di karenakan menjadi permasalahan polusi bagi lingkungan dunia. Produksi minyak dalam negeri china tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi industri di China yang pada akhirnya memaksa China untuk melakukan ekspansi ke negara-negara atau kawasan penghasil minyak lainnya seperti Timur-tengah, Asia, Amerika Latin dan Afrika (Kusuma, 2008:19). Pada tahun 1990 China mulai mengimpor minyak

mentah sebesar 2,1 juta barel/hari dan meningkat hingga 3,5 juta barel/hari (Rahmayeni, 2014:54). dan terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk memenuhi kebutuhan minyak China melakukan ekspansi ke negara-negara atau benua penghasil minyak salah satunya seperti Afrika. Afrika memiliki beberapa negara-negara dengan cadangan minyak yang sangat banyak. Dengan luas wilayah 30.224.050 km persegi termasuk pulau-pulau yang berdekatan, benua Afrika meliputi 20,3% dari total daratan Bumi, dengan 800 juta penduduk di 54 negara, Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia dan benua termiskin dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat di bandingkan dengan negara-negara lain, hal ini disebabkan karena semenjak awal kemerdekaannya dari kolonialisme Barat, Afrika dilanda konflik berkepanjangan. Konflik-konflik yang terjadi di negara-negara Afrika, berhubungan dengan berbagai macam faktor, seperti permasalahan legitimasi pemerintahan, dan konsepsi peran nasional untuk keamanan secara regional umum. Dikarenakan faktor kemiskinan, keamanan dan perseteruan tersebut, negara-negara Barat enggan untuk melakukan investasi dan memberikan bantuan ekonomi pada negara-negara di Afrika. Negara-negara dipandang sebagai ladang konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan ke diktatoran pemimpinnya. Bagi negara-negara Barat menganggap proses demokratisasi di Afrika belum berjalan seperti yang mereka harapkan. Negara-negara barat berusaha menekan para diktator Afrika dengan persyaratan tambahan tentang persyaratan yang terkait dengan demokratisasi, perlawanan korupsi, dan transparansi dalam penggunaan dana anggaran belanja negara (Rinaldi, 2014:2).

Berbeda dengan negara Barat, China melihat hal lain di Afrika, China justru menanamkan investasi besar dan importir besar di Afrika. Hubungan China dengan Afrika selama beberapa puluh tahun terakhir telah tumbuh menjadi yang berpengaruh dalam hubungan internasional, tercatat pada tahun 2008 perdagangan antara China dan Afrika mencapai US\$ 106,8 Milyar dan selama rentan waktu kebangkitan China dan kebutuhan akan energinya yang terus meningkat investasi dan impor minyak dari Afrika terus meningkat (<http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/21173>.diakses pada 25 Oktober 2018).

China telah membatalkan utang Afrika dengan memperluas akses pasar dan beberapa negara telah menjadikan Yuan China sebagai mata uang negaranya salah satunya Zimbabwe, ditambah lagi China menyediakan berbagai kesempatan baru untuk keterlibatan yang positif dalam dunia internasional. Kerjasama antara China dan Afrika sudah berlangsung sejak lama, akan tetapi baru di tahun 2000 forum kerjasama dengan negara-negara Afrika yaitu *Forum On China –Africa Cooperation* (FOCAC) baru dilangsungkan pertamakalinya di Beijing pada bulan Oktober yang diikuti oleh 80 kementerian dan 53 negara Afrika. Kesepakatan awal dari kerjasama forum tersebut, China menyatakan akan menghapus hutang negara-negara di Afrika sebesar Y10 Milyar (US\$ 1,2 juta). Kerjasama forum itu menceminkan bentuk dan isi dari hubungan masa depan China-Afrika bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesejahteraan antara China dan Afrika (Kusuma, 2008:47).

Kerjasama China dan Afrika yang terus meningkat setiap tahunnya mengundang berbagai reaksi khususnya di kalangan negara Barat. Peningkatan

kerjasama China-Afrika membantu negara-negara Afrika mencapai tujuan pembangunan milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan membangkitkan kemajuan bersama. China saat ini dan dari beberapa tahun kebelakang menjadi rekan perdagangan dan Investasi terbesar Afrika. Muncul banyak kecaman keras terhadap cara China mendapatkan Sumber Daya di Afrika, pada tahun 2003 yang hanya \$500 juta naik menjadi \$9 Milyar di tahun 2009 (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/12/101223_chinaafrika.shtml diakses pada 28 Oktober 2018). Kebutuhan akan Sumber daya alam khususnya energi seperti minyak, gas dan mineral yang tinggi yang di butuhkan China bagi perekonomian industrinya yang semakin meningkat dan tumbuh dengan sangat pesat menjadikan China mengambil langkah kebijakannya untuk melakukan investasi dan perdagangan secara besar-besaran, sementara bagi Afrika sangat membutuhkan investasi untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan untuk keperluan pengembangan potensinya.

Negara-negara di Afrika, salah satunya Zimbabwe sangat menyambut baik komitmen kerjasamanya China dalam FOCAC untuk dapat meningkatkan bantuan kepada Afrika serta untuk mempromosikan resolusi konflik dan setelah konflik bagi perdamaian di Afrika. Komitmen China yang akhirnya lebih disetujui oleh Afrika di bandingkan dengan negara lain khususnya Eropa dan Amerika, komitmen akan non-intervensi bagi permasalahan internal negara-negara Afrika, segala urusan domestik dan membangun kemitraan berdasarkan kesetaraan dan saling menghormati. China melakukan kerjasama untuk membantu perekonomian Afrika dan kebutuhan China akan sumber energi, dengan menggunakan Forum kerjasama

China-Afrika / FOCAC tersebut untuk membentuk pola kerjasama dalam forum informal yang diharapkan dan dapat didominasi oleh kebijakan China.

Republik Zimbabwe lahir sebagai negara merdeka pada 18 April 1980. Banyak harapan diberikan kepada Robert Gabriel Mugabe untuk melaksanakan pembangunan di Zimbabwe. Mugabe memberi keyakinan pada kalangan pebisnis mengenai pentingnya investasi asing dan perlunya melaksanakan pembangunan berdasarkan kapitalisme dan kemudian bergerak kepada sosialisme. Dalam perjalanannya mugabe ingin pula memperoleh kepercayaan para petani kulit putih, yang walaupun jumlahnya hanya 6000 orang namun mereka memiliki 40% tanah pertanian dan 1/3 tanah terbaik di Zimbabwe. Peranan kulit putih sangat menentukan bagi kemakmuran ekonomi Zimbabwe karena merupakan tiga perempat hasil industri pertanian dan menghasilkan banyak komoditas dengan menggunakan teknik dan peralatan canggih. Para petani kulit putih menikmati keuntungan besar karena iklim dan curah hujan yang memadai menyebabkan hasil pertanian mencatat rekor pertumbuhan sebesar 24% dalam dua tahun pertama sejak kemerdekaan. *Land Reform* atau Reformasi tanah merupakan proses politik pangan di Zimbabwe dimulai dengan pengambil alihan seluruh tanah-tanah pertanian yang selama ini dikuasai oleh para tuan tanah dari kalangan kulit putih warga negara Eropa. Tanah-tanah akhirnya dibagikan secara merata kepada petani-petani penduduk asli untuk dapat digarap dalam rangka menghasilkan produk pangan lokal (Adnan, 2008:99).

Zimbabwe, salah satu negara anggota dalam Forum kerjasama China-Afrika / FOCAC. Zimbabwe, suatu negara di Afrika bagian selatan memiliki kekayaan

alam yang memungkinkan untuk bahan baku produksi gula, buah-buahan, jagung, tembakau, serta ternak. Namun, segala potensi kekayaan alam yang dimiliki tidak dapat dikelola. Antara tahun 2000 hingga 2007, Zimbabwe mengalami tantangan sosio-ekonomi dan politik terburuk dalam sejarah pasca-kemerdekaan Zimbabwe. Pada periode ini kejatuhan ekonomi Zimbabwe ditengah-tengah politik Internal dan eksternal negara yang semakin tidak stabil, sebagai akibat dari lingkungan ekonomi yang memburuk dan catatan hak asasi manusia yang juga semakin memprihatinkan. Para donor bantuan dari negara-negara yang sebelumnya membantu Zimbabwe dan mitra dagang dari Barat mulai melepaskan diri, menarik dukungan komersil dan politik mereka. Zimbabwe yang terletak antara sungai Limpopo dan sungai Zambesi di bagian Selatan Afrika harus hancur dan mengalami perlambatan ekonomi akibat kekurangan pasokan, naiknya inflasi, dan kekurangan Devisa, sehingga mengakibatkan hiperinflasi pada tahun 2008. Zimbabwe sendiri merupakan negara yang mendapatkan sanksi negara-negara Barat, karena pemerintahan *Zimbabwe African National Union-Patriotic Front* (ZANU-PF) pimpinan Presiden Robert Mugabe dinilai telah melakukan pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia, Napitupulu, (2017:2). Di tengah isolasi dan sanksi dari Barat, China malah bertindak sebaliknya China meningkatkan komunikasi dan taruhannya di Zimbabwe, dengan langkah awal China tidak akan ikut campur dalam urusan domestik Zimbabwe. China melecehkan seruan Barat untuk menekan pemerintahan Zimbabwe untuk reformasi politik dan ekonomi. China hadir dan menawarkan dukungan ekonomi dan politik dalam berbagai bentuk kepada pemerintahan mugabe. China menyediakan dengan beberapa pengaturan

perdagangan, bantuan, pinjaman, investasi dan juga dukungan diplomatik di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama periode tersebut.

Selanjutnya, permasalahan ekonomi negara Zimbabwe berlanjut dengan adanya utang luar negeri yang besar. Zimbabwe merupakan negara yang memiliki utang luar negeri pada negara-negara sahabat maupun pada organisasi internasional. Pada 21 September 2012, Dewan Eksekutif *International Monetary Found* (IMF) menyatakan bahwa setelah krisis ekonomi dan stabilitas politik, ekonomi Zimbabwe sedikit mengalami pemulihan sementara pada tahun 2009. Hal ini di dukung oleh pembentukan pemerintahan koalisi, lingkungan eksternal yang kondusif, penerapan sistem *multicurrency* (berbagai mata uang yang beredar di Zimbabwe), penganggaran kas serta penghentian kuasi-fiskal oleh *Reserve Bank of Zimbabwe* (RBZ). Zimbabwe tetap dan kembali dalam kesulitan utang luar negeri dari berbagai organisasi internasional maupun non-organisasi internasional. Keuangan publik berada di bawah tekanan pada tahun 2011. Operasi pemerintah pusat Zimbabwe mencatat defisit kas 0,6 persen dari PDB pada tahun 2011 (Napitupulu, 2017:3).

FOCAC terbentuk dari tahun 2000, sudah terselenggara tujuh kali pertemuan kerjasama FOCAC. Penyelenggaraan pertemuan yang di adakan tiga tahun sekali ini di adakan dengan pergantian tuan rumah penyelenggara pertemuan dari negara China dan negara-negara Afrika. Fokus kerjasama yang diatur dalam kerangka FOCAC mengacu berbagai bidang, tetapi bidang kerjasama yang dominan adalah kerjasama pada bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi mendominasi dari klausul-klausul yang terdapat dalam dokumen-

dokumen perjanjian FOCAC. Adapun klausul-klausul bidang lainnya seperti keamanan dan sosial-budaya hanya bersifat normatif, berbeda dengan klausul-klausul yang mengatur bidang kerjasama ekonomi yang bersifat teknis dan implementatif (<https://www.focac.org/chn/zywx/zywj/t1591944.htm> diakses pada 27 Oktober 2018) .

Forum kerjasama ini dapat dikatakan tidak dalam kerangka formal, instrumen-instrumen yang dihasilkan dari organisasi ini, ialah deklarasi dan rencana aksi, tidak ada kekuatan mengikat kepada negara-negara yang menyepakatinya. Kesepakatan-kesepakatan instrumen seperti ini jauh lebih lemah kekuatannya di bandingkan dengan instrumen mengikat seperti Traktat dan Piagam. Dengan rancangan sifat forum yang informal seperti itu, sebetulnya China dapat menghadapi kerugian yang signifikan, dikarenakan dapat menimbulkan lemahnya komitmen dari negara-negara Afrika terhadap kesepakatan yang ada dalam organisasi atau forum ini, dan tidak ada mekanisme pemberian sanksi yang dilakukan China untuk mencegah kecurangan atau ketidak patuhan dari negara-negara anggota forum kerjasama ini (Afif, 2014:2).

Melihat pembahasan yang coba peneliti urutkan di atas. Penelitian ini mencoba membahas apa yang menjadi kepentingan China di Zimbabwe, bagaimana Diplomasi Ekonomi yang dijalankan China serta bagaimana hasil dari hubungan dan kerjasama yang telah terjalin melalui FOCAC tersebut.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji Diplomasi ekonomi China dengan Zimbabwe melalui FOCAC. Disini peneliti menggunakan Referensi beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan acuan. Adapun beberapa penelitian

terdahulu yang akan digunakan oleh peneliti adalah *Pertama*, Jurnal dan Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ghazzian Afif dari Universitas Indonesia, dengan judul “*Pembentukan Forum On China-Africa Cooperation oleh Republik Rakyat Cina*”, 2014. Dalam hal ini Afif, (2014). Membahas aktivitas China di Afrika dengan membentuk FOCAC melalui kerangka analisis geo-ekonomi Edward Luttwak dan teori mengenai organisasi internasional informal dari Felicity Vabulas dan Ducan Snidal. Dengan hasil analisis China memiliki kepentingan ekonomi di Afrika dan menghadapi persaingan negara lain dari luar Afrika, dan hasil analisis mengenai China membentuk FOCAC dan merancanginya sebagai organisasi internasional informal.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah kerangka *Forum On China-Africa Cooperation* (FOCAC) sebagai forum yang mewadahi aktivitas kerjasama China dengan Afrika. Perbedaannya ialah disini peneliti akan membahas terkait diplomasi yang dilakukan oleh China dan Zimbabwe dan kerangka pembahasan terkait negara Zimbabwe.

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Maria Fransisca dari Universitas Hasanudin, dengan judul “*Kerjasama Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok – Nigeria Melalui Kerangka Forum On China-Africa Cooperation* (FOCAC). Hasil dari penelitian ini ialah kerjasama RRT dengan Nigeria dalam hal Sumber daya Minyak yang ada di Nigeria. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini ialah pembahasan terkait kerangka FOCAC sebagai wadah kerjasama. Adapun perbedaannya terkait negara sebagai unit analisisnya peneliti mengambil negara Zimbabwe.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Boris Romario Napitupulu dari Universitas Riau, dengan judul “*Pengaruh Tiongkok Terhadap Kebijakan Ekonomi Politik Zimbabwe Dalam Menerapkan Yuan Sebagai Mata Uang Resmi*”. Hasil dari penelitian ini ialah tentang kebijakan Zimbabwe yang menerapkan Yuan sebagai mata Uang resmi negaranya. Dikarenakan kondisi keuangan negara Zimbabwe yang mendapatkan permasalahan Hiperinflasi. Yang membuat mata uang Zimbabwe sudah tidak berlaku di pasaran. Persamaan dengan penelitian ini ialah pembahasan akan negara Zimbabwe dan adapun perbedaannya disini peneliti menambahkan variabel terkait *Forum On China-Africa Cooperation (FOCAC)* di tambah dengan pembahasan dari penelitian terdahulu ini memfokuskan terkait analisa mata uang Yuan yang menjadi mata uang Zimbabwe, sementara dalam penelitian peneliti ini memfokuskan pada diplomasi yang berjalan pada proses kerjasama China dan Zimbabwe.

Keempat, Skripsi ditulis oleh Dwi Rahma Afriyanti dari Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “*Diplomasi Ekonomi China Ke Angola Melalui Forum On China Africa Cooperation (FOCAC)*” . Pembahasan dari penelitian ini tentang diplomasi ekonomi China ke Angola yang dimana Angola ialah negara yang berada di Afrika dan menjadi negara pengeksport minyak terbesar ke China.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pembahasan diplomasi ekonomi serta pembahasan terkait FOCAC itu sendiri. Namun, perbedaannya tentu terkait unit analisa negara yang peneliti bahas yaitu negara

Zimbabwe serta pembahasan terkait adanya kerjasama akan diplomasi politik yang menjadi fokus analisa peneliti.

Hal yang menarik bagi peneliti mengapa akhirnya peneliti mengambil negara Zimbabwe untuk menjadi variabel selanjutnya untuk di teliti ialah melihat Zimbabwe bukan lah negara yang menjadi fokus utama China dalam perebutan sumber daya minyak yang selama ini menjadi kepentingan nasional China. Seperti yang telah peneliti kemukakan sebelumnya di atas, hasil perekonomian sumber daya alam yang menjadi komoditi utama dan bahan ekspor terbesar nya ialah pertanian atau non-energi. Namun, melihat intensitas kerjasama yang begitu erat antara China dan Zimbabwe, menarik bagi peneliti untuk menganalisa salah satu nya ialah apa hal yang sebetulnya menjadi kepentingan China sehingga China menjalankan diplomasi dan kerjasama dengan Zimbabwe.

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin ilmu hubungan internasional yang di antaranya sebagai berikut :

1. Hubungan Internasioanal Di Afrika Dan Timur Tengah, pada mata kuliah ini peneliti mempelajari perjalan Hubungan Internasional yang terjalin di Afrika. Sejarah perkembangannya dan Prediksi Hubungan Internasional di masa mendatang di Afrika.
2. Hubungan Internasional Di Asia Timur, pada mata kuliah ini mempelajari negaranegara di Asia Timur dan Perjalanan Hubungan Internasional di Kawasan ini lebih khusus pembahasan akan negara China.

3. Ekonomi dan Politik Internasional, pada mata kuliah ini peneliti mendapatkan korelasi yang kuat ketika baik itu suatu negara maupun non negara internasional mencoba mempengaruhi suatu ekonomi suatu negara yang lantas pada pengkondisian suatu kebijakan politik suatu negara. Yang dimana pada penelitian ini adanya korelasi kerjasama win-win solution terkait permasalahan kebutuhan perdagangan oleh China dan di awal adanya kebutuhan perekonomian negara-negara Afrika. Dan selanjutnya ada beberapa negara-negara Afrika dan China kebutuhan akan adanya pengakuan politik pada institusi internasional lainnya seperti PBB.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut.

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana Diplomasi Ekonomi China Dengan Zimbabwe melalui *Forum On China-Africa Cooperation (FOCAC)* ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan Latar belakang dan Rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi pembahasan dalam Skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana China menjalankan Diplomasi Ekonomi dengan Zimbabwe melalui FOCAC ?
2. Apa kepentingan China melakukan bantuan dan kerjasama dengan Zimbabwe ?
3. Bagaimana hasil dari Diplomasi Ekonomi China dengan Zimbabwe ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini peneliti ajukan untuk mempersempit fokus terhadap masalah yang akan peneliti bahas. Dari permasalahan yang ada, dari awal berdirinya FOCAC dan permasalahan yang menghinggapi Zimbabwe, disini peneliti akan membahas permasalahan terkait Diplomasi ekonomi yang dilakukan China dengan Zimbabwe dengan rentan waktu dari tahun 2003 hingga 2018. Peneliti melihat periode tersebut sebagai awal permasalahan yang terjadi di Zimbabwe dan langkah awal China untuk masuk dan mendukung dan menjalin Diplomasi dengan Zimbabwe melalui FOCAC.

Pada rentan waktu tersebut 2003 hingga 2018, adapun informasi, data dan pembahasan yang coba peneliti teliti ialah terkait pada Diplomasi ekonomi yang terjalin, proses dan hasil dari kesepakatan kerjasama dari Diplomasi ekonomi yang telah disepakati.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Bagaimana Diplomasi Ekonomi China Dengan Zimbabwe melalui *Forum On China-Africa Cooperation (FOCAC)*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apa yang menjadi kepentingan China di Zimbabwe di tengah permasalahan ekonomi dan politik yang melanda Zimbabwe.
2. Untuk mengetahui bagaimana China menjalankan Diplomasi Ekonomi dengan Zimbabwe.

3. Untuk mengetahui bagaimana hasil Diplomasi Ekonomi China dengan Zimbabwe selama ini.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan perbendaharaan pustaka serta dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu pengetahuan di studi Ilmu Hubungan Internasional tentang Ekonomi-Politik Internasional dan strategi negara dalam menarapkan kebijakan luar negeri.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan meneliti khususnya bagi peneliti di bidang Ilmu hubungan Internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi hubungan internasional maupun umum.